



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
PROVINSI JAWA TIMUR**

# **PERUBAHAN RENJA 2022**

**AGUSTUS, 2022**

## DAFTAR ISI

Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel .....	iii
Peraturan Gubernur Jawa Timur .....	iv
 BAB 1 PENDAHULUAN .....	 5
1.1 Latar Belakang .....	5
1.2 Dasar Hukum .....	9
1.3 Maksud dan Tujuan .....	11
1.3.1 Maksud .....	11
1.3.2 Tujuan .....	11
1.4 Sistematika Penulisan .....	11
BAB 2 EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN .....	13
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II .....	13
2.2 Permasalahan dan Penyelesaian Masalah dalam Pelaksanaan Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 .....	23
BAB 3 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....	26
3.1 Tujuan dan Sasaran .....	26
3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2022 .....	28
3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 .....	35
BAB 4 PENUTUP .....	48
4.1 Kaidah-kaidah pelaksanaan .....	48
4.2 Rencana tindak lanjut .....	49

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 .....	14
<sup>3</sup> Tabel 3. 1	Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Proja Provinsi Jawa Timur .....	27
Tabel 3. 2	Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2022.....	29
Tabel 3. 3	Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2022 .....	36

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
NOMOR 41 TAHUN 2022**

**TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
NOMOR 38 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR  
TAHUN 2022**

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dengan berpedoman pada Perubahan Renstra PD Tahun 2019-2024 dan Rancangan Perubahan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 serta hasil pengendalian pelaksanaan Renja PD sampai dengan Triwulan II Tahun 2022.

Rencana Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat tentang kebijakan, program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang kemudian menjadi bahan utama masukan dan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau disebut RKPD Provinsi Jawa Timur, serta pagu indikatif dan prakiraan maju yang menggambarkan kebutuhan dana guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.

Penyusunan Renja dilakukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah, maka perlu adanya tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah. Seiring dengan perkembangan keadaan, berdasarkan hasil evaluasi, terdapat ketidaksesuaian pelaksanaan RKPD Tahun 2022 yang meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah, dan Keuangan Daerah, Rencana Program dan Kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau

- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya maka harus dipergunakan untuk tahun berjalan.

Perangkat Daerah berkewajiban untuk Menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dengan berpedoman pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 dan Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2022 serta hasil pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Perumusan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah;
- b. Penyajian Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah;
- c. Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah;
- d. Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
- e. Penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang telah ditetapkan sebagai pandemi oleh World Health Organization (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020, saat ini masih berkelanjutan dengan munculnya varian baru. Pandemi COVID-19 sudah semakin mewabah di Indonesia, dengan diawali tajamnya peningkatan jumlah kasus pasien terinfeksi, pasien dalam pengawasan, dan orang dalam pemantauan setiap hari. Oleh karena itu, pemerintah telah menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), serta Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka

Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan dimana telah resmi ditetapkan sebagai Undang-Undang oleh DPR RI pada tanggal 12 Mei 2020 menjadi Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2020, maka perlu dilakukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergi antar Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, untuk melakukan refocusing kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Dengan adanya kondisi Bencana Nasional pandemi COVID-19 yang ada di Indonesia tersebut, Provinsi Jawa Timur juga memberikan kontribusi pada jumlah masyarakat yang terinfeksi. Gubernur Jawa Timur menindaklanjutinya dengan mengeluarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/108/KPTS/013/2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Jawa Timur untuk pengendalian wabah di Jawa Timur. Bencana Nasional Pandemi COVID-19 secara langsung berdampak terhadap pemenuhan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah sehingga berakibat pula pada perubahan beberapa target kinerja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur bersama ini melakukan Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2022 dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi kinerja Perangkat Daerah selama Bencana Nasional Pandemi COVID-19.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah menjadi pedoman bagi Pemerintahan Daerah dalam menyediakan dan menyajikan informasi secara berjenjang dan mandiri dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah. Serta merupakan perwujudan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang didesentralisasikan sehingga pemanfaatannya dapat mendukung proses penyelenggaraan:

1. Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Perencanaan Anggaran Daerah;
3. Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah;
4. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;

5. Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
6. Pengawasan Keuangan Daerah;
7. Analisis Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya.

Diharapkan dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, bersih dan bebas korupsi sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Seiring dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka perlu dilakukan pula penyesuaian target dan indikator program, kegiatan, sub kegiatan.

Mempedomani Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 906/2114/SJ tanggal 19 April 2022 perihal Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait DAK Tahun Anggaran 2022, DBHDR Tahun Anggara 2022, DBHCHT Tahun Anggaran 2022, Usulan Kemendikbudristek dan Kemenkes, maka perlu dilakukan penyesuaian target, indikator sub kegiatan pada perubahan Renja tahun 2022 karena Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur mendapatkan DBHCHT Bidang Penegakan Hukum pada Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai dan Program Pemberantasan BKC Ilegal. Selain itu, pergeseran dan perubahan Renja tahun 2022 juga disebabkan adanya penyesuaian program/kegiatan prioritas serta efektivitas dan efesiensi anggaran operasi.

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Perubahan Tahun 2022 serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Perubahan Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).



## **1.2 Dasar Hukum**

Adapun yang menjadi landasan hukum penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur Tahun 2023, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Panduan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Daerah;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Pelanggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022;
27. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender;
28. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur;

29. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 116 Tahun 2021 Tanggal 31 Desember 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022;
30. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
31. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2022.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Maksud disusunnya Perubahan Renja adalah untuk melakukan penyesuaian target kinerja dan kerangka pendanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD Tahun 2022.

#### **1.3.2 Tujuan**

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

- a. Penyesuaian target kinerja dan pagu anggaran pada program, kegiatan dan sub kegiatan (penambahan, pengurangan atau pergeseran) serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
- b. Sebagai dasar penyusunan perubahan rencana kerja anggaran Perangkat Daerah;
- c. Menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika Penyusunan Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

Bab ini memuat :

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum

- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

## BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERKENAAN

Bab ini memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, serta permasalahan dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2022;

## BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini mengungkapkan Tujuan, Sasaran, Reviu terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2022 dan Rancangan Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022.

## BAB IV. PENUTUP

## **BAB 2**

### **EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN**

Pelaksanaan evaluasi sebagai sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan, sehingga atas dasar evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui :

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Evaluasi Renja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 didasarkan dan merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan (RPJMDP) Provinsi Timur Tahun 2019-2024, Renstra Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024.

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II**

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun 2022 dan pencapaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur sampai dengan Triwulan II tahun 2022 dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapainya kinerja program serta implikasi yang timbul maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang diambil.

Hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2022 dengan berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

Hasil Evaluasi Renja Satpol PP Provinsi Jawa Timur sampai dengan Triwulan II Tahun 2022, adalah sebagaimana tabel dalam format berikut:

**Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2022**

(Target program, kegiatan dan sub kegiatan Renja Tahun 2022 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan-Berdasarkan Perubahan Renstra 2019-2024)

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Renstra (Th 2019 - 2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja PD s/d Triwulan II Tahun 2022	
								Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi	Tingkat Realisasi
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/9)
1				Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
1.05				Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat									
				Satuan Polisi Pamong Praja									
1.05	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Indikator Program yang Tercapai	75%		75%	100,00%	133%	75%	16,67%	22,23%
					Persentase Realisasi Anggaran	90%		90%	97,79%	109%	90%	85,17%	94,63%
					Indeks Profesionalitas ASN	85,00		85,00	85,00	100%	85,00	0	0,00%
1.05	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35 dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	100%	7 Dokumen	4 Dokumen	57,14%
1.05	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50 dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	100%	10 Dokumen	5 Dokumen	50,00%
1.05	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	5 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Renstra (Th 2019 - 2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja PD s/d Triwulan II Tahun 2022	
								Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi	Tingkat Realisasi
1.05	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen penyusunan perubahan RKA	5 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00%
1.05	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	5 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00%
1.05	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan	15Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00%
1.05	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja	20 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	2 Dokumen	50%
1.05	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja	20 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	2 Dokumen	50%
1.05	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan	60 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	6 Laporan	50%
1.05	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	60 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	6 Laporan	50%
1.05	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	6 Laporan	50%
1.05	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Verifikasi Penatausahaan Keuangan	60 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	6 Laporan	50%
1.05	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Akuntansi Perangkat Daerah	60 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	6 Laporan	50%
1.05	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD	10 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	50%	2 Laporan	1 Laporan	50%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Renstra (Th 2019 - 2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja PD s/d Triwulan II Tahun 2022	
								Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi	Tingkat Realisasi
1.05	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Tanggapan Atas LHP	5 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00%
1.05	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	60 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	6 Laporan	50%
1.05	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis	5 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100,00%
1.05	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD	20 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	2 Laporan	50,00%
1.05	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada OPD	20 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	2 Laporan	50,00%
1.05	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	2 Laporan	50,00%
1.05	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Jasa Pengadaan Pakaian Dinas	5 paket		1 paket	1 paket	100%	1 paket	0 paket	0,00%
1.05	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan SKP	60 laporan		12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	6 Laporan	50,00%
1.05	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Laporan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	5 laporan		1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	0 Laporan	0,00%



Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Renstra (Th 2019 - 2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja PD s/d Triwulan II Tahun 2022	
								Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi	Tingkat Realisasi
					Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
1.05	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	5 laporan		1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	0 Laporan	0,00%
1.05	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	20 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	2 Laporan	50,00%
1.05	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Pengadaan	5 Paket		1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100,00%
1.05	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Pengadaan	5 Paket		1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100,00%
1.05	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Paket Pengadaan	5 Paket		1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100,00%
1.05	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Paket Pengadaan	5 paket		1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100,00%
1.05	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Paket Pengadaan	5 paket		1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100,00%
1.05	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5 laporan		1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
1.05	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket	5 paket		1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100,00%
1.05	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20 laporan		4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	2 Laporan	50,00%
1.05	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Paket Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 paket		1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100,00%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Renstra (Th 2019 - 2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja PD s/d Triwulan II Tahun 2022	
								Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi	Tingkat Realisasi
1.05	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 bulan		12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	6 bulan	50,00%
1.05	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 paket		1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100,00%
1.05	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5 paket		1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100,00%
1.05	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 paket		1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100,00%
1.05	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Paket Jasa	5 paket		1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100,00%
1.05	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Paket Jasa	5 paket		1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100,00%
1.05	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Jasa	5 paket		1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100,00%
1.05	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Paket Jasa	5 paket		1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100,00%
1.05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang tertangani	80%		80,00%	98,04%	123%	80,00%	87,16%	108,95%
					Presentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	80%		80,00%	99,56%	124%	80,00%	57,14%	71,43%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Renstra (Th 2019 - 2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja PD s/d Triwulan II Tahun 2022	
								Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi	Tingkat Realisasi
					Persentase Satuan Linmas dan Masyarakat yang terlatih	80%		80,00%	100,00%	125%	80,00%	22,40%	28,00%
					Persentase SDM yang terlatih	80%		80,00%	100%	125%	80,00%	0,00%	0,00%
1.05	02	1.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban umum	80%		80,00%	98,04%	123%	80,00%	87,16%	108,94%
1.05	02	1.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Pencegahan Gangguan Trantibum	20 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	2 Laporan	50,00%
1.05	02	1.01	02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Penindakan atas Gangguan Trantibum	20 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	105%	4 Laporan	2 Laporan	50,00%
1.05	02	1.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Trantibum	20 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	2 Laporan	50,00%
1.05	02	1.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Peningkatan Kapasitas SDM	20 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	2 Laporan	50,00%
1.05	02	1.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Laporan Peningkatan Kapasitas SDM	20 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	2 Laporan	50,00%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Renstra (Th 2019 - 2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja PD s/d Triwulan II Tahun 2022	
								Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi	Tingkat Realisasi
1.05	02	1.01	06	Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Kegiatan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan kejahatan	5 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,00%
1.05	02	1.01	07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban umum	10 unit		2 unit	2 unit	100%	2 unit	0 unit	0,00%
1.05	02	1.01	08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Kegiatan Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	5 dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	0 Dokumen	100,00%
1.05	02	1.01	09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	5 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	0 Laporan	0,00%
1.05	02	1.02		Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Jumlah Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	20 Kegiatan		4 Kegiatan	4 Kegiatan	100%	4 Kegiatan	2 Kegiatan	50,00%
1.05	02	1.02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Sosialisasi Penegakan Perda dan Pergub	20 laporan		4 laporan	4 laporan	100%	4 laporan	2 laporan	50,00%
1.05	02	1.02	02	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap	20 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	2 laporan	50,00%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Renstra (Th 2019 - 2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja PD s/d Triwulan II Tahun 2022	
								Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi	Tingkat Realisasi
					Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur								
1.05	02	1.02	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Penanganan atas Pelanggaran Perda dan Pergub	20 laporan		4 laporan	4 laporan	100%	4 laporan	2 laporan	50,00%
1.05	02	1.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Jumlah Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	10 Kegiatan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100,00%
1.05	02	1.03	01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	5 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100,00%
1.05	02	1.03	02	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS	Jumlah Laporan Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Perda	20 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	50%	2 Laporan	2 Laporan	50,00%
1.05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase aparatur damkar dan masyarakat yang terampil dalam pemadaman kebakaran, penyelamatan, dan pendataan daerah rawan kebakaran	80%					80%	58,82%	73,53%
1.05	04	1.01		Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Persentase aparatur yang meningkat kemampuan dan keahliannya sesuai bidang tugasnya	80%					80%	75,00%	93,75%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Renstra (Th 2019 - 2024)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja PD s/d Triwulan II Tahun 2022	
								Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi	Tingkat Realisasi
1.05	04	1.01	03	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah aparatur yang meningkat kemampuan dan keahliannya sesuai bidang tugasnya	300 Orang					200 Orang	150 Orang	75,00%
1.05	04	1.02		Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase anggota Balakar dan masyarakat yang sudah terlatih dalam penanganan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	80%					80%	47,06%	58,83%
1.05	04	1.02	01	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah anggota Balakar yang sudah terampil dan ahli dalam tugasnya membantu Damkar Kab/Kota Jumlah anggota Damkar yang terampil	300 orang					170 Orang	80 orang	47,06%

**Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur Tahun 2021-2022**

## **2.2 Permasalahan dan Penyelesaian Masalah dalam Pelaksanaan Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2022**

Berdasarkan tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 diatas, permasalahan dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan hasil Renja Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2022 sebagai berikut :

### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi**

Indikator dari Program Pelayanan Kesekretariatan ada 3 yakni :

- 1) Persentase Indikator Program yang tercapai
- 2) Persentase Realisasi Anggaran
- 3) Indeks Profesionalitas ASN

Ketiga Indikator Program dimaksud belum tercapai dikarenakan perhitungan Indikator baru dapat dilaksanakan pada Akhir Triwulan IV. Selain itu Program ini terdiri dari beberapa kegiatan yang diampu oleh 3 Subbagian yakni :

- a. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran, target kegiatan untuk Tahun Anggaran 2022 belum terealisasi, dimana sisa target kegiatan akan dilaksanakan pada sisa Triwulan III dan IV Tahun 2022 dikarenakan output dokumen tersebut baru ditetapkan pada Triwulan III dan IV Tahun 2022, yakni Perubahan Renja Tahun 2022, Renja Tahun 2022, RKA Perubahan Tahun 2022, RKA Tahun 2023.
- b. Subbagian Keuangan, target kegiatan untuk Tahun Anggaran 2022 belum terealisasi, dimana sisa target kegiatan akan dilaksanakan pada sisa Triwulan III dan IV Tahun 2022 dikarenakan output dokumen dimaksud dilaksanakan setiap bulan hingga Triwulan IV.
- c. Subbagian Umum dan Kepegawaian, target kegiatan untuk Tahun 2022 belum terealisasi dimana sisa target akan dilaksanakan pada sisa Triwulan III dan IV Tahun 2022 karena output dokumen dimaksud dilaksanakan pada Triwulan IV.

### **2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**

Terdiri dari 3 (tiga Kegiatan) yakni :

1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi;
2. Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur;

### 3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi.

Kegiatan tersebut beberapa belum dilaksanakan pada triwulan II tahun anggaran 2022. Pelaksanaan kegiatan masih ada kendala seperti optimalisasi kegiatan masih perlu ditingkatkan. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah kurang terpenuhinya kebutuhan biaya dan operasional kegiatan yang berpengaruh terhadap konsistensi kinerja dalam Penyelenggaraan Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta penggunaan anggaran yang terkadang kurang sesuai dengan pelaksanaan kegiatan, lokasi dan waktu pelaksanaan.

Berdasarkan Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja diatas, disimpulkan sebagai berikut:

- a. Kendala utama dari eksternal adalah adanya pandemi COVID-19 yang mempengaruhi kebijakan penganggaran kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur sehingga berakibat pada pencapaian target program dan kegiatan;
- b. Kendala utama dari internal adalah Satuan Polisi Pamong Praja mengalami permasalahan yakni terbatasnya jumlah SDM Satpol PP Provinsi Jawa Timur yaitu dari faktor kekurangan personil dimana banyak personil yang pensiun serta banyak personil dengan usia 50 tahun ke atas yang mencapai 42% sehingga sangat beresiko untuk bertugas di masa pandemi, sarana dan prasarana dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Trantibumlinmas dan Sub Urusan Pemadam Kebakaran.

Selain itu faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program dikarenakan adanya inkonsistensi dalam pelaksanaan perencanaan yang mempengaruhi secara langsung terhadap capaian kinerja, dan juga sinkronisasi kinerja antar bidang belum sesuai dengan target sasaran.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab kurang optimalnya kinerja pelaksanaan progam/kegiatan serta untuk meminimalisir implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renja Perangkat Daerah, adalah dilakukan perubahan Rencana Kerja tahun 2023 mengacu pada perubahan anggaran Provinsi Jawa Timur dengan tujuan target kinerja Renja pada akhir tahun rencana dapat tercapai. Perubahan Renja dimaksud meliputi:



1. Terhadap indikator program yang tidak tercapai akan ditindak lanjuti dengan, penindakan-penindakan yang melalui proses persuasif, preventif, dan edukatif serta data-data yang valid;
2. Adanya penyesuaian inventarisasi dan pemetaan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah terkait program DBHCHT Tahun anggaran 2022 berdasarkan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 906/2114/SJ tanggal 19 April 2022.
3. Penyesuaian nomenklatur program/kegiatan serta indikator dan target kinerja menyesuaikan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur sebagai akibat:
  - a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah terkait penyesuaian Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK).
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
  - d. Amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja;
  - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten / Kota;
  - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Daerah.

## **BAB 3**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Dalam perumusan perubahan tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 didasarkan pada perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Rencana Strategis Perubahan Satpol PP Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024.

#### **3.1 Tujuan dan Sasaran**

Untuk mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja berorientasi pada berkurangnya pelanggaran terhadap perda, yang tentu saja tidak mudah, dimana karakteristik masyarakat tertentu kita yang cenderung tidak patuh dan mensiasati hukum. Selanjutnya, dalam upaya mengurangi gangguan trantibum di Jawa Timur, pelibatan Satpol PP sebagai mitra aparat Kepolisian dalam upaya menciptakan rasa aman semakin dapat ditemukan dalam kegiatan bersama yang ditandai dengan hadirnya Satpol PP dalam berbagai kegiatan apel siaga cipta kondisi. Sedangkan meningkatkan pelibatan Satuan Pelindungan Masyarakat (Satlinmas) dalam membantu kegiatan trantibum, bencana dan kebakaran, Pemilu serta kegiatan lainnya menjadi prioritas sasaran Satpol PP Provinsi Jawa Timur dalam mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat.

Disisi lain, peran Satpol PP Provinsi Jawa Timur dalam mewujudkan penyelenggaraan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran di Jawa Timur, dihadapkan pada percepatan/akselerasi penguatan kelembagaan agar sasaran yang diharapkan dapat segera tercapai.

Tujuan strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur dalam rangka perubahan Renstra 2019-2024 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda/Perkada.
2. Terwujudnya sinergitas dan sinkronisasi penyelenggaraan trantibumlinmas.
3. Terwujudnya pelibatan Satlinmas dalam penyelenggaraan trantibum serta bencana dan kebakaran.
4. Terwujudnya penguatan kelembagaan damkar.

Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Satpol PP Provinsi Jawa Timur serta target kinerja dalam perubahan Renstra 2019-2024 disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur**

NOMOR	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET	
			RENJA 2022	RENJA P 2022
SEBELUM PERUBAHAN RENSTRA 2019-2024				
1	Meningkatkan Pelayanan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat di Jawa Timur			
1.1	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap per Undang-Undang an Daerah	Persentase penanganan gangguan Trantibum dan Linmas		
1.2	Meningkatnya ketertiban umum masyarakat	Persentase penanganan gangguan Trantibum dan Linmas		
1.3	Meningkatkan peran Satlinmas dan masyarakat dalam Pam Swakarsa, deteksi dini daerah rawan bencana dan kebakaran	Meningkatkan peran Satlinmas dan masyarakat dalam Pam Swakarsa, deteksi dini daerah rawan bencana dan kebakaran		

NOMOR	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET	
			RENJA 2022	RENJA P 2022
SETELAH PERUBAHAN RENSTRA 2019-2024				
1	Terwujudnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Pelindungan Masyarakat, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan			
1.1	Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat di Jawa Timur	Persentase penanganan gangguan Trantibum dan Linmas	85%	85%
1.2	Terwujudnya penyelenggaraan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran di Jawa Timur	Persentase penanganan kebakaran dan non kebakaran	80%	80%

### 3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2022

Rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 adalah sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3. 2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2022**

KODE	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD 2022					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.05	Satuan Polisi Pamong Praja				172.813.216.866	Satuan Polisi Pamong Praja				176.483.216.866	
X XX 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jawa Timur	Persentase Indikator Program yang Tercapai	75%	39.467.800.866	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jawa Timur	Persentase Indikator Program yang Tercapai	75%	39.467.800.866	
		Jawa Timur	Persentase Realisasi Anggaran	90%			Jawa Timur	Persentase Realisasi Anggaran	90%		
		Jawa Timur	Indeks Profesionalitas ASN	85%			Jawa Timur	Indeks Profesionalitas ASN	85%		
X XX 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jawa Timur	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	223.482.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jawa Timur	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	223.482.000	
X XX 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jawa Timur	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	15.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jawa Timur	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	15.000.000	
X XX 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jawa Timur	Jumlah Dokumen RKA	1 Dokumen	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jawa Timur	Jumlah Dokumen RKA	1 Dokumen	10.000.000	
X XX 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jawa Timur	Jumlah dokumen penyusunan perubahan RKA	1 Dokumen	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jawa Timur	Jumlah dokumen penyusunan perubahan RKA	1 Dokumen	10.000.000	
X XX 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jawa Timur	Jumlah dokumen DPA	1 Dokumen	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jawa Timur	Jumlah dokumen DPA	1 Dokumen	10.000.000	
X XX 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jawa Timur	Jumlah Dokumen DPA Perubahan	1 Dokumen	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jawa Timur	Jumlah Dokumen DPA Perubahan	1 Dokumen	10.000.000	
X XX 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jawa Timur	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja	4 Dokumen	50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jawa Timur	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja	4 Dokumen	50.000.000	
X XX 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jawa Timur	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja	4 Dokumen	118.482.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jawa Timur	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja	4 Dokumen	118.482.000	
X XX 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jawa Timur	Jumlah Laporan Keuangan	12 Laporan	31.789.730.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jawa Timur	Jumlah Laporan Keuangan	12 Laporan	31.789.730.000	
X XX 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jawa Timur	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	12 Laporan	31.302.626.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jawa Timur	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	12 Laporan	31.302.626.000	
X XX 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jawa Timur	Jumlah Laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Laporan	457.104.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jawa Timur	Jumlah Laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Laporan	457.104.000	
X XX 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jawa Timur	Jumlah Laporan Verifikasi Penatausahaan Keuangan	12 Laporan	5.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jawa Timur	Jumlah Laporan Verifikasi Penatausahaan Keuangan	12 Laporan	5.000.000	

KODE	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD 2022					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
					(Rp.)					(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X XX 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jawa Timur	Jumlah Laporan Akuntansi Perangkat Daerah	12 Laporan	5.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jawa Timur	Jumlah Laporan Akuntansi Perangkat Daerah	12 Laporan	5.000.000	
X XX 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jawa Timur	Jumlah Laporan Keuangan SKPD	2 Laporan	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jawa Timur	Jumlah Laporan Keuangan SKPD	2 Laporan	5.000.000	
X XX 01 1.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jawa Timur	Jumlah Dokumen Tanggapan Atas LHP	1 Dokumen	5.000.000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jawa Timur	Jumlah Dokumen Tanggapan Atas LHP	1 Dokumen	5.000.000	
X XX 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jawa Timur	Jumlah Laporan Keuangan	12 Laporan	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jawa Timur	Jumlah Laporan Keuangan	12 Laporan	5.000.000	
X XX 01 1.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jawa Timur	Jumlah Laporan Prognosis	1 Laporan	5.000.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jawa Timur	Jumlah Laporan Prognosis	1 Laporan	5.000.000	
X XX 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jawa Timur	Jumlah Dokumen Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	110.073.423	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jawa Timur	Jumlah Dokumen Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	110.073.423	
X XX 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jawa Timur	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada OPD	4 Laporan	110.073.423	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jawa Timur	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada OPD	4 Laporan	110.073.423	
X XX 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jawa Timur	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4 Laporan	1.109.700.298	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jawa Timur	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4 Laporan	1.109.700.298	
X XX 01 1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jawa Timur	Jumlah Paket Jasa Pengadaan Pakaian Dinas	1 paket	10.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jawa Timur	Jumlah Paket Jasa Pengadaan Pakaian Dinas	1 paket	10.000.000	
X XX 01 1.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jawa Timur	Jumlah Laporan SKP	12 Laporan	1.082.700.298	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jawa Timur	Jumlah Laporan SKP	12 Laporan	1.082.700.298	
X XX 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jawa Timur	Jumlah Laporan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1 Laporan	9.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jawa Timur	Jumlah Laporan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1 Laporan	9.000.000	
X XX 01 1.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jawa Timur	Jumlah Laporan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	1 laporan	8.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jawa Timur	Jumlah Laporan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	1 laporan	8.000.000	
X XX 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jawa Timur	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	4 Laporan	200.050.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jawa Timur	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	4 Laporan	200.050.000	
X XX 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jawa Timur	Jumlah Paket Pengadaan	1 Paket	94.600.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jawa Timur	Jumlah Paket Pengadaan	1 Paket	94.600.000	

KODE	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD 2022					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
					(Rp.)					(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X XX 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jawa Timur	Jumlah Paket Pengadaan	1 Paket	12.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jawa Timur	Jumlah Paket Pengadaan	1 Paket	12.000.000	
X XX 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jawa Timur	Jumlah Paket Pengadaan	1 Paket	3.500.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jawa Timur	Jumlah Paket Pengadaan	1 Paket	3.500.000	
X XX 01 1.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jawa Timur	Jumlah Paket Pengadaan	1 paket	10.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jawa Timur	Jumlah Paket Pengadaan	1 paket	10.000.000	
X XX 01 1.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jawa Timur	Jumlah Paket Pengadaan	1 paket	79.950.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jawa Timur	Jumlah Paket Pengadaan	1 paket	79.950.000	
X XX 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jawa Timur	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan	174.707.134	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jawa Timur	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan	174.707.134	
X XX 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jawa Timur	Jumlah Paket	1 paket	174.707.134	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jawa Timur	Jumlah Paket	1 paket	174.707.134	
X XX 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jawa Timur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Laporan	5.057.332.938	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jawa Timur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Laporan	5.057.332.938	
X XX 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jawa Timur	Jumlah Paket Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 paket	4.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jawa Timur	Jumlah Paket Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 paket	4.000.000	
X XX 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jawa Timur	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	366.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jawa Timur	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	366.000.000	
X XX 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jawa Timur	Jumlah Paket Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 paket	5.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jawa Timur	Jumlah Paket Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 paket	5.000.000	
X XX 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jawa Timur	Jumlah Paket Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 paket	4.682.332.938	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jawa Timur	Jumlah Paket Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 paket	4.682.332.938	
X XX 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jawa Timur	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 paket	977.432.207	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jawa Timur	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 paket	977.432.207	
X XX 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jawa Timur	Jumlah Paket Jasa	1 paket	82.500.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jawa Timur	Jumlah Paket Jasa	1 paket	82.500.000	
X XX 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jawa Timur	Jumlah Paket Jasa	1 paket	170.428.101	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jawa Timur	Jumlah Paket Jasa	1 paket	170.428.101	

KODE	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD 2022					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
					(Rp.)					(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
X XX 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jawa Timur	Jumlah Paket Jasa	1 paket	287.904.106	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jawa Timur	Jumlah Paket Jasa	1 paket	287.904.106	
X XX 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jawa Timur	Jumlah Paket Jasa	1 paket	436.600.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jawa Timur	Jumlah Paket Jasa	1 paket	436.600.000	
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jawa Timur	Persentase gangguan trantibum yang tertangani	80%	132.945.416.000	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jawa Timur	Persentase gangguan trantibum yang tertangani	80%	136.615.416.000	
		Jawa Timur	Presentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	80%			Jawa Timur	Presentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	80%		
		Jawa Timur	Persentase Satuan Linmas dan Masyarakat yang terlatih	80%			Jawa Timur	Persentase Satuan Linmas dan Masyarakat yang terlatih	80%		
		Jawa Timur	Persentase SDM yang terlatih	80%			Jawa Timur	Persentase SDM yang terlatih	80%		
1.05.02.101	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jawa Timur	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban umum	80%	131.940.816.000	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jawa Timur	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban umum	80%	131.940.816.000	
1.05.02.101.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jawa Timur	Jumlah Laporan Pencegahan Gangguan Trantibum	4 Laporan	640.816.000	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jawa Timur	Jumlah Laporan Pencegahan Gangguan Trantibum	4 Laporan	640.816.000	
1.05.02.101.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jawa Timur	Jumlah Laporan Penindakan atas Gangguan Trantibum	4 Laporan	100.000.000	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jawa Timur	Jumlah Laporan Penindakan atas Gangguan Trantibum	4 Laporan	100.000.000	
1.05.02.101.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Kertertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jawa Timur	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Trantibum	4 Laporan	580.000.000	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Kertertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jawa Timur	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Trantibum	4 Laporan	580.000.000	
1.05.02.101.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jawa Timur	Jumlah Laporan Peningkatan Kapasitas SDM	4 Laporan	550.000.000	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jawa Timur	Jumlah Laporan Peningkatan Kapasitas SDM	4 Laporan	550.000.000	
1.05.02.101.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Jawa Timur	Jumlah Laporan Peningkatan Kapasitas SDM	4 Laporan	20.000.000	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Jawa Timur	Jumlah Laporan Peningkatan Kapasitas SDM	4 Laporan	20.000.000	



KODE	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD 2022					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
					(Rp.)					(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.05.02.101.06	Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jawa Timur	Jumlah Kegiatan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan kejahatan	1 Kegiatan	100.000.000	Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jawa Timur	Jumlah Kegiatan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan kejahatan	1 Kegiatan	100.000.000	
1.05.02.101.07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jawa Timur	Jumlah Laporan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban umum	2 unit	129.850.000.000	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jawa Timur	Jumlah Laporan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban umum	2 unit	129.850.000.000	
1.05.02.101.08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jawa Timur	Jumlah Kegiatan Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	1 Dokumen	50.000.000	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jawa Timur	Jumlah Kegiatan Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	1 Dokumen	50.000.000	
1.05.02.101.09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jawa Timur	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Laporan	50.000.000	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jawa Timur	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Laporan	50.000.000	
1.05.02.102	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Jawa Timur	Jumlah Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	4 Kegiatan	825.000.000	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Jawa Timur	Jumlah Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	4 Kegiatan	4.495.000.000	
1.05.02.102.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jawa Timur	Jumlah Laporan Sosialisasi Penegakan Perda dan Pergub	4 laporan	408.000.000	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jawa Timur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	4 laporan	1.408.000.000	
1.05.02.102.02	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jawa Timur	Jumlah Laporan Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	4 Laporan	100.000.000	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jawa Timur	Jumlah Laporan Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	4 Laporan	100.000.000	

KODE	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD 2022					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
					(Rp.)					(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.05.02.102.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jawa Timur	Jumlah Laporan Penanganan atas Pelanggaran Perda dan Pergub	4 laporan	317.000.000	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jawa Timur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	4 laporan	2.987.000.000	
1.05.02.103	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Jawa Timur	Jumlah Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	2 Kegiatan	179.600.000	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Jawa Timur	Jumlah Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	2 Kegiatan	179.600.000	
1.05.02.103.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jawa Timur	Jumlah Laporan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	1 Laporan	75.000.000	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jawa Timur	Jumlah Laporan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	1 Laporan	75.000.000	
1.05.02.103.02	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS	Jawa Timur	Jumlah Laporan Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Perda	2 Laporan	104.600.000	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS	Jawa Timur	Jumlah Laporan Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Perda	2 Laporan	104.600.000	
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Jawa Timur	Persentase aparatur damkar dan masyarakat yang terampil dalam pemadaman kebakaran, penyelamatan, dan pendataan daerah rawan kebakaran	80%	400.000.000	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Jawa Timur	Persentase aparatur damkar dan masyarakat yang terampil dalam pemadaman kebakaran, penyelamatan, dan pendataan daerah rawan kebakaran	80%	400.000.000	
1.05.04.1.01	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Jawa Timur	Persentase aparatur yang meningkat kemampuan dan keahliannya sesuai bidang tugasnya	1 Dokumen	200.000.000	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Jawa Timur	Persentase aparatur yang meningkat kemampuan dan keahliannya sesuai bidang tugasnya	1 Dokumen	200.000.000	
1.05.04.1.01.03	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jawa Timur	Jumlah aparatur yang meningkat kemampuan dan keahliannya sesuai bidang tugasnya	200 Orang	200.000.000	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jawa Timur	Jumlah aparatur yang meningkat kemampuan dan keahliannya sesuai bidang tugasnya	200 Orang	200.000.000	

KODE	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD 2022					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
					(Rp.)					(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.05.04.1.02	Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jawa Timur	Persentase anggota Balakar dan masyarakat yang sudah terlatih dalam penanganan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	80%	200.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jawa Timur	Persentase anggota Balakar dan masyarakat yang sudah terlatih dalam penanganan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	80%	200.000.000	
1.05.04.1.02.01	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jawa Timur	Jumlah anggota Balakar yang sudah terampil dan ahli dalam tugasnya membantu Damkar Kab/Kota Jumlah anggota Damkar yang terampil	170 orang	200.000.000	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jawa Timur	Jumlah anggota Balakar yang sudah terampil dan ahli dalam tugasnya membantu Damkar Kab/Kota Jumlah anggota Damkar yang terampil	170 orang	200.000.000	

### 3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Provinsi Jawa Timur, pada dasarnya kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi sebagai penyelenggaraan Penegakan Perundang-undangan, Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di wilayah Provinsi Jawa Timur.

Sejalan dengan hal tersebut, maka program dan kegiatan yang dirancang Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 tidak mengalami perubahan, terdiri dari 3 (tiga) program dan 50 (limapuluh) kegiatan dengan jumlah pagu pada Belanja Langsung, Rekapitulasi program dan kegiatan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2022**

KODE	URUSAN / BIDANG	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN		LOKASI	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SETELAH PERUBAHAN		LOKASI PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	SUMBER DANA
	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TOLOK UKUR	TARGET		TOLOK UKUR	TARGET					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X XX 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Indikator Program yang Tercapai	75%	Jawa Timur	Persentase Indikator Program yang Tercapai	75%	Jawa Timur	39.467.800.866	39.467.800.866	-	APBD
		Persentase Realisasi Anggaran	90%	Jawa Timur	Persentase Realisasi Anggaran	90%	Jawa Timur			-	APBD
		Indeks Profesionalitas ASN	85%	Jawa Timur	Indeks Profesionalitas ASN	85%	Jawa Timur			-	APBD
X XX 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	Jawa Timur	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	Jawa Timur	223.482.000	223.482.000	-	APBD
X XX 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	Jawa Timur	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	Jawa Timur	15.000.000	15.000.000	-	APBD
X XX 01 1.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	1 Dokumen	Jawa Timur	Jumlah Dokumen RKA	1 Dokumen	Jawa Timur	10.000.000	10.000.000	-	APBD
X XX 01 1.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen penyusunan perubahan RKA	1 Dokumen	Jawa Timur	Jumlah dokumen penyusunan perubahan RKA	1 Dokumen	Jawa Timur	10.000.000	10.000.000	-	APBD

KODE	URUSAN / BIDANG	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN		LOKASI	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SETELAH PERUBAHAN		LOKASI PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	SUMBER DANA
	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TOLOK UKUR	TARGET		TOLOK UKUR	TARGET					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X XX 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	1 Dokumen	Jawa Timur	Jumlah dokumen DPA	1 Dokumen	Jawa Timur	10.000.000	10.000.000	-	APBD
X XX 01 1.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan	1 Dokumen	Jawa Timur	Jumlah Dokumen DPA Perubahan	1 Dokumen	Jawa Timur	10.000.000	10.000.000	-	APBD
X XX 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja	4 Dokumen	Jawa Timur	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja	4 Dokumen	Jawa Timur	50.000.000	50.000.000	-	APBD
X XX 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja	4 Dokumen	Jawa Timur	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja	4 Dokumen	Jawa Timur	118.482.000	118.482.000	-	APBD
X XX 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan	12 Laporan	Jawa Timur	Jumlah Laporan Keuangan	12 Laporan	Jawa Timur	31.789.730.000	31.789.730.000	-	APBD
X XX 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	12 Laporan	Jawa Timur	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	12 Laporan	Jawa Timur	31.302.626.000	31.302.626.000	-	APBD
X XX 01 1.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Laporan	Jawa Timur	Jumlah Laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Laporan	Jawa Timur	457.104.000	457.104.000	-	APBD
X XX 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Verifikasi Penatausahaan Keuangan	12 Laporan	Jawa Timur	Jumlah Laporan Verifikasi Penatausahaan Keuangan	12 Laporan	Jawa Timur	5.000.000	5.000.000	-	APBD
X XX 01 1.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Akuntansi Perangkat Daerah	12 Laporan	Jawa Timur	Jumlah Laporan Akuntansi Perangkat Daerah	12 Laporan	Jawa Timur	5.000.000	5.000.000	-	APBD

KODE	URUSAN / BIDANG	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN		LOKASI	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SETELAH PERUBAHAN		LOKASI PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	SUMBER DANA
	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TOLOK UKUR	TARGET		TOLOK UKUR	TARGET					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X XX 01 1.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD	2 Laporan	Jawa Timur	Jumlah Laporan Keuangan SKPD	2 Laporan	Jawa Timur	5.000.000	5.000.000	-	APBD
X XX 01 1.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Tanggapan Atas LHP	1 Dokumen	Jawa Timur	Jumlah Dokumen Tanggapan Atas LHP	1 Dokumen	Jawa Timur	5.000.000	5.000.000	-	APBD
X XX 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	12 Laporan	Jawa Timur	Jumlah Laporan Keuangan	12 Laporan	Jawa Timur	5.000.000	5.000.000	-	APBD
X XX 01 1.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis	1 Laporan	Jawa Timur	Jumlah Laporan Prognosis	1 Laporan	Jawa Timur	5.000.000	5.000.000	-	APBD
X XX 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	Jawa Timur	Jumlah Dokumen Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	Jawa Timur	110.073.423	110.073.423	-	APBD
X XX 01 1.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada OPD	4 Laporan	Jawa Timur	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada OPD	4 Laporan	Jawa Timur	110.073.423	110.073.423	-	APBD
X XX 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4 Laporan	Jawa Timur	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4 Laporan	Jawa Timur	1.109.700.298	1.109.700.298	-	APBD

KODE	URUSAN / BIDANG	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN		LOKASI	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SETELAH PERUBAHAN		LOKASI PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	SUMBER DANA
	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TOLOK UKUR	TARGET		TOLOK UKUR	TARGET					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X XX 01 1.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Jasa Pengadaaan Pakaian Dinas	1 paket	Jawa Timur	Jumlah Paket Jasa Pengadaaan Pakaian Dinas	1 paket	Jawa Timur	10.000.000	10.000.000	-	APBD
X XX 01 1.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan SKP	12 Laporan	Jawa Timur	Jumlah Laporan SKP	12 Laporan	Jawa Timur	1.082.700.298	1.082.700.298	-	APBD
X XX 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Laporan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1 Laporan	Jawa Timur	Jumlah Laporan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1 Laporan	Jawa Timur	9.000.000	9.000.000	-	APBD
X XX 01 1.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	1 laporan	Jawa Timur	Jumlah Laporan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	1 laporan	Jawa Timur	8.000.000	8.000.000	-	APBD
X XX 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	4 Laporan	Jawa Timur	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	4 Laporan	Jawa Timur	200.050.000	200.050.000	-	APBD
X XX 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Pengadaan	1 Paket	Jawa Timur	Jumlah Paket Pengadaan	1 Paket	Jawa Timur	94.600.000	94.600.000	-	APBD
X XX 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Pengadaan	1 Paket	Jawa Timur	Jumlah Paket Pengadaan	1 Paket	Jawa Timur	12.000.000	12.000.000	-	APBD
X XX 01 1.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Paket Pengadaan	1 Paket	Jawa Timur	Jumlah Paket Pengadaan	1 Paket	Jawa Timur	3.500.000	3.500.000	-	APBD
X XX 01 1.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Paket Pengadaan	1 paket	Jawa Timur	Jumlah Paket Pengadaan	1 paket	Jawa Timur	10.000.000	10.000.000	-	APBD
X XX 01 1.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	Jumlah Paket Pengadaan	1 paket	Jawa Timur	Jumlah Paket Pengadaan	1 paket	Jawa Timur	79.950.000	79.950.000	-	APBD

KODE	URUSAN / BIDANG	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN		LOKASI	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SETELAH PERUBAHAN		LOKASI PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	SUMBER DANA
	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TOLOK UKUR	TARGET		TOLOK UKUR	TARGET					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Berbasis Elektronik pada SKPD										
X XX 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan	Jawa Timur	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan	Jawa Timur	174.707.134	174.707.134	-	APBD
X XX 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket	1 paket	Jawa Timur	Jumlah Paket	1 paket	Jawa Timur	174.707.134	174.707.134	-	APBD
X XX 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Laporan	Jawa Timur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Laporan	Jawa Timur	5.057.332.938	5.057.332.938	-	APBD
X XX 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Paket Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 paket	Jawa Timur	Jumlah Paket Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 paket	Jawa Timur	4.000.000	4.000.000	-	APBD
X XX 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	Jawa Timur	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	Jawa Timur	366.000.000	366.000.000	-	APBD
X XX 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 paket	Jawa Timur	Jumlah Paket Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 paket	Jawa Timur	5.000.000	5.000.000	-	APBD
X XX 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Jasa	1 paket	Jawa Timur	Jumlah Paket Penyediaan Jasa	1 paket	Jawa Timur	4.682.332.938	4.682.332.938	-	APBD



KODE	URUSAN / BIDANG	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN		LOKASI	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SETELAH PERUBAHAN		LOKASI PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	SUMBER DANA
	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TOLOK UKUR	TARGET		TOLOK UKUR	TARGET					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Pelayan Umum Kantor			Pelayan Umum Kantor						
X XX 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 paket	Jawa Timur	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 paket	Jawa Timur	977.432.207	977.432.207	-	APBD
X XX 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Paket Jasa	1 paket	Jawa Timur	Jumlah Paket Jasa	1 paket	Jawa Timur	82.500.000	82.500.000	-	APBD
X XX 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Paket Jasa	1 paket	Jawa Timur	Jumlah Paket Jasa	1 paket	Jawa Timur	170.428.101	170.428.101	-	APBD
X XX 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Jasa	1 paket	Jawa Timur	Jumlah Paket Jasa	1 paket	Jawa Timur	287.904.106	287.904.106	-	APBD
X XX 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Paket Jasa	1 paket	Jawa Timur	Jumlah Paket Jasa	1 paket	Jawa Timur	436.600.000	436.600.000	-	APBD
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang tertangani	80%	Jawa Timur	Persentase gangguan trantibum yang tertangani	80%	Jawa Timur	132.945.416.000	136.615.416.000	- 3.670.000.000	APBD
		Presentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	80%	Jawa Timur	Presentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	80%	Jawa Timur			-	APBD

KODE	URUSAN / BIDANG	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN		LOKASI	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SETELAH PERUBAHAN		LOKASI PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	SUMBER DANA
	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TOLOK UKUR	TARGET		TOLOK UKUR	TARGET					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Persentase Satuan Linmas dan Masyarakat yang terlatih	80%	Jawa Timur	Persentase Satuan Linmas dan Masyarakat yang terlatih	80%	Jawa Timur			-	APBD
		Persentase SDM yang terlatih	80%	Jawa Timur	Persentase SDM yang terlatih	80%	Jawa Timur			-	APBD
1.05.02.101	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban umum	0,8	Jawa Timur	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban umum	0,8	Jawa Timur	131.940.816.000	131.940.816.000	-	APBD
1.05.02.101.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Pencegahan Gangguan Trantibum	4 Laporan	Jawa Timur	Jumlah Laporan Pencegahan Gangguan Trantibum	4 Laporan	Jawa Timur	640.816.000	640.816.000	-	APBD
1.05.02.101.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Penindakan atas Gangguan Trantibum	4 Laporan	Jawa Timur	Jumlah Laporan Penindakan atas Gangguan Trantibum	4 Laporan	Jawa Timur	100.000.000	100.000.000	-	APBD
1.05.02.101.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Trantibum	4 Laporan	Jawa Timur	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Trantibum	4 Laporan	Jawa Timur	580.000.000	580.000.000	-	APBD

KODE	URUSAN / BIDANG	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN		LOKASI	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SETELAH PERUBAHAN		LOKASI PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	SUMBER DANA
	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TOLOK UKUR	TARGET		TOLOK UKUR	TARGET					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.05.02.101.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Peningkatan Kapasitas SDM	4 Laporan	Jawa Timur	Jumlah Laporan Peningkatan Kapasitas SDM	4 Laporan	Jawa Timur	550.000.000	550.000.000	-	APBD
1.05.02.101.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Laporan Peningkatan Kapasitas SDM	4 Laporan	Jawa Timur	Jumlah Laporan Peningkatan Kapasitas SDM	4 Laporan	Jawa Timur	20.000.000	20.000.000	-	APBD
1.05.02.101.06	Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Kegiatan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan kejahatan	1 Kegiatan	Jawa Timur	Jumlah Kegiatan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan kejahatan	1 Kegiatan	Jawa Timur	100.000.000	100.000.000	-	APBD
1.05.02.101.07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban umum	2 unit	Jawa Timur	Jumlah Laporan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban umum	2 unit	Jawa Timur	129.850.000.000	129.850.000.000	-	APBD
1.05.02.101.08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Kegiatan Penyusunan SOP Ketertiban	1 Dokumen	Jawa Timur	Jumlah Kegiatan Penyusunan SOP Ketertiban	1 Dokumen	Jawa Timur	50.000.000	50.000.000	-	APBD

KODE	URUSAN / BIDANG	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN		LOKASI	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SETELAH PERUBAHAN		LOKASI PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	SUMBER DANA
	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TOLOK UKUR	TARGET		TOLOK UKUR	TARGET					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Umum dan Ketenteraman Masyarakat			Umum dan Ketenteraman Masyarakat						
1.05.02.101.09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Laporan	Jawa Timur	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Laporan	Jawa Timur	50.000.000	50.000.000	-	APBD
1.05.02.102	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Jumlah Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	4 Kegiatan	Jawa Timur	Jumlah Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	4 Kegiatan	Jawa Timur	825.000.000	4.495.000.000	3.670.000.000	APBD
1.05.02.102.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Sosialisasi Penegakan Perda dan Pergub	4 laporan	Jawa Timur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	4 laporan	Jawa Timur	408.000.000	1.408.000.000	1.000.000.000	APBD DBH CHT
1.05.02.102.02	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan	4 Laporan	Jawa Timur	Jumlah Laporan Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan	4 Laporan	Jawa Timur	100.000.000	100.000.000	-	APBD

KODE	URUSAN / BIDANG	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN		LOKASI	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SETELAH PERUBAHAN		LOKASI PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	SUMBER DANA
	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TOLOK UKUR	TARGET		TOLOK UKUR	TARGET					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur			Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur						
1.05.02.102.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Penanganan atas Pelanggaran Perda dan Pergub	4 laporan	Jawa Timur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	4 laporan	Jawa Timur	317.000.000	2.987.000.000	2.670.000.000	APBD DBH CHT
1.05.02.103	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Jumlah Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	2 Kegiatan	Jawa Timur	Jumlah Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	2 Kegiatan	Jawa Timur	179.600.000	179.600.000	-	APBD
1.05.02.103.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	1 Laporan	Jawa Timur	Jumlah Laporan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	1 Laporan	Jawa Timur	75.000.000	75.000.000	-	APBD
1.05.02.103.02	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang	Jumlah Laporan Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Perda	2 Laporan	Jawa Timur	Jumlah Laporan Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Perda	2 Laporan	Jawa Timur	104.600.000	104.600.000	-	APBD

KODE	URUSAN / BIDANG	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN		LOKASI	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SETELAH PERUBAHAN		LOKASI PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	SUMBER DANA
	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TOLOK UKUR	TARGET		TOLOK UKUR	TARGET					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS										
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase aparatur damkar dan masyarakat yang terampil dalam pemadaman kebakaran, penyelamatan, dan pendataan daerah rawan kebakaran	80%	Jawa Timur	Persentase aparatur damkar dan masyarakat yang terampil dalam pemadaman kebakaran, penyelamatan, dan pendataan daerah rawan kebakaran	80%	Jawa Timur	400.000.000	400.000.000	-	APBD
1.05.04.1.01	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Persentase aparatur yang meningkat kemampuan dan keahliannya sesuai bidang tugasnya	1 Dokumen	Jawa Timur	Persentase aparatur yang meningkat kemampuan dan keahliannya sesuai bidang tugasnya	1 Dokumen	Jawa Timur	200.000.000	200.000.000	-	APBD
1.05.04.1.01.03	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah aparatur yang meningkat kemampuan dan keahliannya sesuai bidang tugasnya	200 Orang	Jawa Timur	Jumlah aparatur yang meningkat kemampuan dan keahliannya sesuai bidang tugasnya	200 Orang	Jawa Timur	200.000.000	200.000.000	-	APBD
1.05.04.1.02	Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase anggota Balakar dan masyarakat yang sudah terlatih dalam penanganan	80%	Jawa Timur	Persentase anggota Balakar dan masyarakat yang sudah terlatih dalam penanganan	80%	Jawa Timur	200.000.000	200.000.000	-	APBD

KODE	URUSAN / BIDANG	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SEBELUM PERUBAHAN		LOKASI	INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN SETELAH PERUBAHAN		LOKASI PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	SUMBER DANA
	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TOLOK UKUR	TARGET		TOLOK UKUR	TARGET					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		kebakaran dan penyelamatan non kebakaran			kebakaran dan penyelamatan non kebakaran						
1.05.04.1.02.01	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah anggota Balakar yang sudah terampil dan ahli dalam tugasnya membantu Damkar Kab/Kota Jumlah anggota Damkar yang terampil	170 orang	Jawa Timur	Jumlah anggota Balakar yang sudah terampil dan ahli dalam tugasnya membantu Damkar Kab/Kota Jumlah anggota Damkar yang terampil	170 orang	Jawa Timur	200.000.000	200.000.000	-	APBD

## **BAB 4**

### **PENUTUP**

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2022.

Dengan adanya Perubahan RKPD tahun 2022 maka perlu dilakukan Perubahan Renja Tahun 2022 dengan memperbaiki ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 guna menjaga konsistensi Capaian Kinerja Perangkat Daerah dalam Prioritas Pembangunan dan Visi Misi Daerah serta menjaga Konsistensi antara Perencanaan dan Penganggaran dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **4.1 Kaidah-kaidah pelaksanaan**

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur Tahun 2022, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai strategi yaitu terciptanya situasi kondisi masyarakat yang aman, tentram, nyaman dan tertib yang terencana sesuai dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :
  - a. melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2022 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;



- b. menjaga konsistensi antara pembahasan pada Perubahan RKPD, Perubahan Renja dan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2022.

#### **4.2 Rencana tindak lanjut**

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Tahun 2022, selanjutnya Perubahan Renja Tahun 2022 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Surabaya, 07 Agustus 2022

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**M. HADI WAWAN GUNTORO, S.STP, M.Si, CIPA**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19770323 199511 1 001